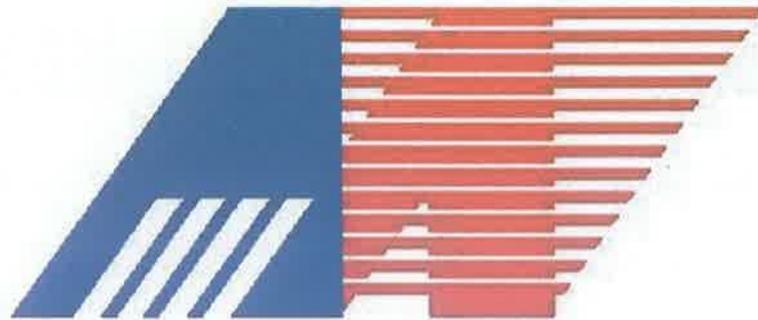


**LAPORAN TRANSPARANSI
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT. BPR ARUM MANDIRI KENANGA
TAHUN 2024**



**JL.Raya Bantul Km 7,5 Sewon Bantul Yogyakarta
TELEPON: (0274) 6466235**



PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPR Arum Mandiri Kenanga pada tahun 2024 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2024 di tengah kondisi perekonomian dan sektor usaha yang sebelumnya pulih.

BPR Arum Mandiri Kenanga memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR Arum Mandiri Kenanga dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Surabaya. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Arum Mandiri Kenanga didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral serta signifikan dalam penerapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan BPR..

BPR Arum Mandiri Kenanga telah beroperasi lebih dari 20 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi penyedia layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah.

Dalam penerapan Tata Kelola, BPR Arum Mandiri Kenanga selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur & Infrastruktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang 2024 dan untuk di tahun mendatang, BPR Arum Mandiri Kenanga terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.



LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

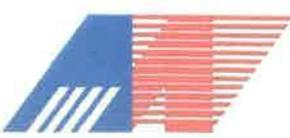
A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) Atas Penerapan Tata Kelola

Nama BPR	PT. BPR ARUM MANDIRI KENANGA
Alamat	JL.Raya Bantul Km 7,5 Sewon Bantul Yogyakarta
Nomor Telepon	(0274) 6466235
Posisi Laporan	31 Desember 2024
Peringkat Komposit	4
Predikat Komposit	Kurang Baik
Kesimpulan / Penjelasan	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip tata kelola. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh pemegang saham dan manajemen BPR.

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	Nama	: NURHATIKA SUSANTI
	Jabatan	: Direktur
Tugas dan Tanggung Jawab :		
<ol style="list-style-type: none">Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR dan BPR Syariah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatianDireksi berwenang mewakili BPR dan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPSDireksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasiDireksi wajib menindaklanjuti:<ol style="list-style-type: none">temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan auditor ekstern danhasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain		
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :		
Seluruh tindakan Direktur harus sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja atau Anggaran Dasar BPR mengikat dan menjadi tanggung jawab Direktur bersangkutan sesuai dengan Anggaran Dasar BPR dan/ atau peraturan perundang-undangan, dan yang sudah di		



rekomedasikan oleh Dewan Komisaris yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur serta memberikan nasehat kepada Direktur.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Direktur wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	Nama	: DJOKO SUSENO
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<p>1.Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.</p> <p>2. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR.</p> <p>3.Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:</p> <p>a. penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan dan</p> <p>b. hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>4. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR</p> <p>5. Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris</p> <p>6. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap a. pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR</p> <p>b. penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat</p>	
2.	Nama	: SUKO HARYONO
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<p>1.Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.</p> <p>2. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR.</p>	



3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - a. penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan dan
 - b. hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR
5. Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris
6. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap
 - a. pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR
 - b. penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat

Rekomendasi Kepada Direksi :

Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit Intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya

Penjelasan Lebih Lanjut :

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Dewan Komisaris dapat meminta Direktur untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	



PT BPR Arum Mandiri Kenanga belum memiliki komite karena modal inti masih < 50 Milyar

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	BPR AMK sampai bulan ini belum memiliki anggota komite karena modal inti masih < 50 Milyar

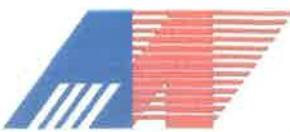
c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
.BPR Arum Mandiri Kenanga belum memiliki program kerja, karena modal inti masih < 50 milyar			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	NURHATIKA SUSANTI	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			



Nihil

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	NURHATIKA SUSANTI	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Nihil				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	NURHATIKA SUSANTI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Nihil				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	NURHATIKA SUSANTI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Nihil				



D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	DJOKO SUSENO	Rp0	0%
2.	SUKO HARYONO	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Nihil			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	DJOKO SUSENO	-	-	0%
2.	SUKO HARYONO	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Nihil				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	DJOKO SUSENO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	SUKO HARYONO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Nihil				



2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	DJOKO SUSENO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	SUKO HARYONO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Nihil				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	1	Rp168.000.000	2	Rp163.200.000
2.	Tunjangan	1	Rp9.300.996	2	Rp5.400.000
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp177.300.996		Rp168.600.000
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Gaji dan Tunjangan Direktur dan Dewan Komisaris per bulan					



H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1.89 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	14 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.47 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.72 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.33 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Rasio Gaji Pengurus dan Pegawai BPR Arum Mandiri Kenanga, dan sebagai informasi bahwa sampai saat ini Direktur Operasional yang membawahkan Kepatuhan belum ada	

I. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	07 Januari 2024	2	1. Hari Minggu 7 Januari 2024 pembahasan tentang Rencana Bisnis RBB, Isu isu Strategis BPR, Evakuasi/penetapan Kebijakan Strategis, Evaluasi realisasi Rencana rencana Bisnis BPR, Manajemen Risiko, Tata Kelola dan TI, APU PPT PPPSPM dll
2.	17 Juli 2024	2	Rencana Penggabungan PT BPR Arum Mandiri Melati ke dalam PT BPR Arum Mandiri Kenanga
3.	11 November 2024	2	Evaluasi Rencana Bisnis BPR, Isu isu Strategis BPR, Evaluasi / Penetapan Kebijakan Strategis , Evaluasi realisasi Rencana Bisnis BPR,Manajmen Risiko, TI (Teknologi Informasi), Tata kelola, APU PPT PPPSPM, Lain lain
4.	11 Desember 2024	2	Rencana Bisnis BPR, Isu isu Strategis BPR, Evaluasi / Penetapan Kebijakan Strategis , Evaluasi realisasi Rencana Bisnis BPR,Manajmen Risiko, TI (Teknologi Informasi), Manajemen Risiko, Tata kelola dan TI, APU PPT PPPSPM, RBB dan RAKB 2025 Lain lain
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Dewan Komisaris sampai bulan Desember 2024 telah mengadakan pertemuan tatap muka			



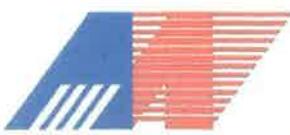
sebanyak 4 kali

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	DJOKO SUSENO	1	0	100%
2.	SUKO HARYONO	1	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut : Dari Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 kehadiran Dewan Komisaris ke BPR Arum Mandiri dalam rangka kunjungan dan rapat bersama sebanyak 17 kali. termasuk rapat penggabungan BPR antara BPR Arum Mandiri Kenanga dengan BPR Arum Mandiri Melati				

J. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal* (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut : Fraud sampai dengan bulan Januari tahun 2025 Nihil / TIDAK ADA								



K. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Di Bulan Januari 2025 ada permasalahan Hukum terkait kredit macet yang di hadapi BPR Arum Mandiri Kenanga tetapi tidak sampai merugikan BPR baik Financial maupun Non Financial		

L. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.	Ir, A Sutjipto	Ketua Yayasan Bhakti Yogya	Nurhatika Susanti	Direktur	Sewa gedung	20 juta rupiah	Nihil
Penjelasan Lebih Lanjut :							
PT BPR AMK sewa gedung ke Yayasan Bhakti Yogya di bayarkan setahun sekali Rp 20.000.000,- / tahun sudah termasuk pajak							

M. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Tidak ada					



PT. BPR ARUM MANDIRI KENANGA
JL. Raya Bantul Km 7,5 Sewon Bantul Yogyakarta

Telepon: (0274) 6466235

website: bprarummandirikenanga.com, Email: bpramkbantul1@gmail.com

Bantul, 17 Februari 2025

PT. BPR ARUM MANDIRI KENANGA

Di buat oleh


Nurhatika Susanti
Direktur



PT. Bank Perkonomian Rakyat
ARUM MANDIRI KENANGA

Mengetahui


Suko Haryono
Komisaris

Menyetujui


Djoko Suseno
Komisaris Utama